dpmptsp

DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DOKUMEN RENJA

Dinas Penanaman Modal dan PTSP



2026

KATA PENGANTAR

Puii syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia serta ridho-Nya, Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 telah selesai disusun.

Rencana Kerja disusun untuk memenuhi amanat pada Pasal 15 dan Pasal 126 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana kerja Ini memuat prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau sebagai acuan untuk melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2026 sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Pada rencana kerja ini memuat 6 Program, 15 Kegiatan dan 49 Sub Kegiatan serta untuk pelaksanaannya memerlukan dana sebesar Rp. **21,590,085,363**,- (*Dua puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh juta delapan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tiga*).

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja ini. Semoga keberadaan dokumen ini dapat bermanfaat khususnya dalam rangka pelaksanaan perencanaan pembangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, November 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

HASPARIZAL HANDRA, S.Sos
Pembina Utama Madya
NIP. 19690329 199003 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Dasar Hukum 4

1.3. Maksud dan Tujuan 8

1.4. Sistematika Penulisan..... 9

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU..... 8

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD..... 10

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD..... 23

2.3. Isu-isu strategis 28

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD..... 32

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 43

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 45

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 45

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD..... 48

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 51

BAB V. PENUTUP..... 65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023..... 13

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau 27

Tabel.2.3.Review terhadap Rancangan Awal Tahun 2024 RKPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP..... 33

Tabel.2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 44

Tabel 3.1 Permasalahan Pelayanan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Terhadap Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Strategis Renstra BKPM Tahun 2020-2024 47

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Program Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 50

Tabel 4.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2024 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROVINSI KEPULAUAN RIAU 52

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja Perangkat Daerah. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai RKPD dan Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan

Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah , evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan:

1. Substansi Renja Perangkat Daerah merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program, kegiatan dan sub kegiatan dirinci menurut sumber pendaaan yang diusulkan.
3. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran,target capaian program/ kegiatan/ sub kegiatan, target keluaran sub kegiatan, total dana yang diperlukan sub kegiatan.
4. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen resmi program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah yang akan diaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

KETERKAITAN RENJA DENGAN DOKUMEN RKPD, RENSTRA, RENJA K/L DAN RENJA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

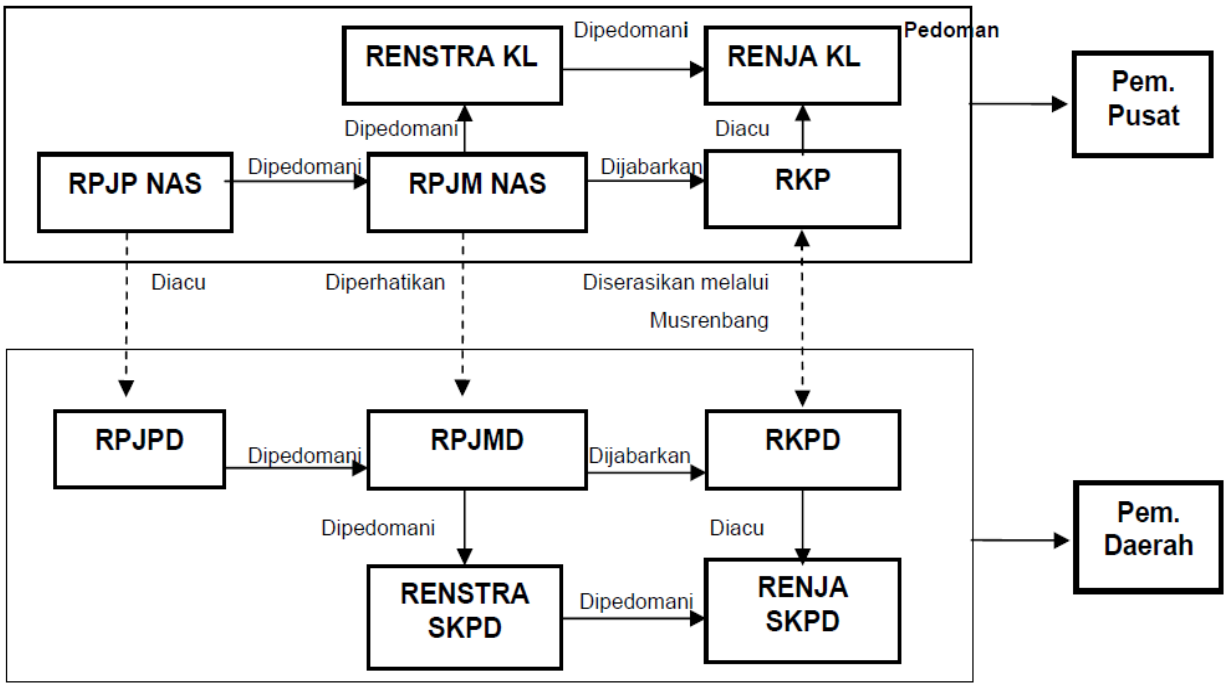

1.2. Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 42);
12. Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah

dimutakhirkan dengan Keputusan Mendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 54);
21. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 – 2025;
22. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 784)

23. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 817);
24. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1505 Tahun 2021 tentang Koordinator dan Sub Koordinator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai pedoman penyusunan perencanaan anggaran program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Provinsi Kepulauan Riau pada urusan penanaman modal. Adapun Tujuan dari Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021- 2026.
b. Merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang;
c. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung program Pemerintah Daerah;
d. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;

e. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu

Kegiatan *review* hasil pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP tahun 2024 (tahun n-2) ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan DPMPTSP dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan Renstra DPMPTSP serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Pencapaian pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Evaluasi kinerja ditentukan oleh hasil manfaat input dan output DPMPTSP tahun 2024. Input dalam pengertian ini terbatas pada nilai uang yang digunakan dalam menghasilkan output, sedangkan sumberdaya manusia dan bahan baku tidak dimasukan dalam evaluasi ini. Sedang output adalah hasil fisik dari suatu kegiatan. Outcome atau indikator hasil tidak dianalisis pada evaluasi ini, mengingat diperlukan periode yang lebih lama untuk dapat melihat efektifitas kegiatan.

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 juga dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan, pelaksanaannya, dan hasil.

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut:

a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksanaan;

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2024 sebagai data awal dalam penyusunan perencanaan tahun 2026;
b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya; dan

Pada Tahun 2024 DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau bersama OPD yang ada di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di perintahkan untuk melakukan perubahan nomenklatur, kodefikasi dan klasifikasi Program dan Kegiatan yang terdapat dalam dokumen perencanaan sebelumnya menjadi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdapat di Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Oleh sebab itu, DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun evaluasi 2024 telah melakukan perubahan tersebut dan juga telah mengevaluasi pelaksanaan Renja pada masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dijabarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (ouput)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program, kegiatan, sub kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2	18				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**									
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor**	**100%**	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	**100%**	**100%**	**100%**
2	18	01	1.01		***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***
2	18	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	2	1	1	100%	1	4	66%
2	18	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	0	0	0	0%	0	0	0%

2	18	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	2	1	1	100%	1	4	66%
2	18	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	2	1	1	100%	1	4	66%
2	18	01	1.02		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***
2	18	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	264	130	42	42	100%	40	212	80%
2	18	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6	2	1	1	100%	1	4	66%
2	18	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	2	1	1	100%	1	4	66%
2	18	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	0	0	0		0	0	0%

2	18	01	1.03		***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah teradministrasi dengan baik***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***
2	18	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6	2	1	1	100%	1	4	66%
2	18	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4	0	0	0	0%	0	0	0%
2	18	01	1.05		***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Persentase Disiplin Pegawai***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***
2	18	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3	0	0	0	0%	0	0	0%
2	18	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4	2	1	1	100%	1	3	75%
2	18	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	3	0	0	0	0%	0	0	0%
2	18	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	41	2	50	50	100%	0	52	127%
2	18	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31	0	0	0	0%	0	0	0%
2	18	01	1.06		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***

2	18	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	2	1	1	100%	1	4	66%
2	18	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	0	0	0	0%	0	0	0%
2	18	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	0	0	0	0%	0	0	0%
2	18	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	2	1	1	100%	1	4	66%
2	18	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	2	1	1	100%	1	4	66%
2	18	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	18	2	3	3	100%	2	7	38%
2	18	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6	2	1	1	100%	1	4	66%
2	18	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6	2	1	1	100%	1	4	66%
2	18	01	1.07		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***
2	18	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	1	0	0	0%	0	0	100%

2	18	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6	1	4	4	100%	0	5	83%
2	18	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	0	0	0	0%	0	0	0%
2	18	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	2	3	3	100%	1	6	100%
2	18	01	1.08		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***
2	18	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6	2	1	1	100%	1	4	66%
2	18	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6	2	1	1	100%	1	4	66%
2	18	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	2	1	1	100%	1	4	66%
2	18	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	2	1	1	100%	1	4	66%
2	18	01	1.09		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara sesuai rencana kebutuhan***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***

2	18	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	55	21	13	13	100%	11	45	81%
2	18	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35	14	7	7	100%	7	28	80%
2	18	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	6	2	1	1	100%	1	4	66%
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan Berusaha**	**100%**	**0**	**95%**	**0**	**0%**	**100%**	**100%**	**0%**
						Persentase pemenuhan dokumen peta potensi investasi provinsi	**100%**	**0**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
2	***18***	***02***	***1.01***		***Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi***	***Jumlah Regulasi pemberian Insentif dan kemudahaan berusaha***	***6***	***0***	***2***	***2***	***100%***	***1***	***3***	***50%***
						Jumlah perusahaan yang mendapatkan insentif dan kemudahan berusaha	***900***	***0***	***150***	***0***	***0%***	***200***	***200***	***22%***
2	18	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	6	0	2	2	100%	1	3	50%
2	18	02	1.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha Di Daerah	750	0	0	0	0%	0	0	0%

2	**18**	**02**	**1.02**		***Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi***	***Jumlah Dokumen Pemetaan Potensi Investasi***	***11***	***2***	***1***	***1***	***100%***	***1***	***4***	***36%***
2	18	02	1.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	5	1	0	0	0%	0	1	20%
2	18	02	1.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	6	1	1	1	100%	1	3	50%
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase kenaikan Minat Penanaman Modal**	**12%**	**7%**	**8%**	**10%**	**100%**	**10%**	**10%**	**83%**
2	**18**	**03**	**1.01**		***Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi***	***Jumlah Penambahan Investor Dalam Negeri dan Luar Negeri***	***42300***	***11600***	***6500***	***8603***	***132%***	***7200***	***27403***	***64%***
2	18	03	1.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Provinsi	5	1	0	0	0	1	2	40%
2	18	03	1.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	6	2	1	2	100%	1	5	83%
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**	**86,1**	**83,15**	**84,2**	**85,58**	**101%**	**84,88**	**84,88**	**98%**
						Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP	**100%**	**80%**	**90%**	**98%**	**108%**	**100%**	**100%**	**100%**
2	18	04	1.01		***Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase jumlah perizinan dan nonperizinan yang dilayani dengan SOP***	***100%***	***80%***	***90%***	***98%***	***108%***	***100%***	***100%***	***100%***

2	18	04	1.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lintas Daerah Kabupaten/Kota	890	55	20	20	100%	25	100	11%
2	18	04	1.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Pelaku Usaha	570	200	25	13	52%	20	233	40%
2	**18**	**04**	**1.02**		***Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi***	***Persentase jumlah perizinan dan nonperizinan yang dilayani dengan SOP***	***100%***	***80%***	***90%***	***98%***	***108%***	***100%***	***100%***	***100%***
2	18	04	1.02	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	2950	0	120	120	4%	25	145	5%

2	18	04	1.02	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	1200	30	30	60	5%	18	108	9%
2	18	04	1.02	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi	240	66	45	111	46%	20	111	82%
2	18	04	1.02	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Provinsi	230	0	30	30	13%	20	30	21%
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
2	**18**	**05**	**1.01**		***Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi***	***Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***

2	18	05	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	255	51	11	51	20%	0	51	20%
2	18	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	1435	304	382	395	103%	549	1248	86%
2	18	05	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	390	475	46	95	100%	25	265	152%
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	***Persentase Ketersediaan Data/Informasi Perkembangan Investasi Di Kepulauan Riau***	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
2	**18**	**06**	**1.01**		***Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi***	***Data/Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dan Aplikasi Sistem Informasi Terkelola Dengan Baik***	***72***	***24***	***12***	***12***	***100%***	***12***	***48***	***66%***
2	18	06	1.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	6	2	1	1	100%	1	4	66%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (PD)

Kewenangan pemerintah provinsi pada urusan penanaman modal mencakup : (1) Bidang Penanaman Modal (2) Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Kinerja penanaman modal terutama dilihat dari nilai realisasi investasi. Nilai Realisasi Investasi didapat dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dilaporkan oleh perusahaan. Setiap penanam modal berkewajiban membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal sesuai Undang-Undang No. 25 Tahun 2007.

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan secara berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi penanam modal. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) ditujukan untuk memantau realisasi investasi dan produksi. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) mencakup kegiatan penanaman modal yang dilakukan perusahaan di setiap lokasi dan bidang usaha investasi, kecuali bidang usaha perdagangan. Komitmen DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau beserta instansi terkait terhadap pengawasan Laporan Kegiatan Penanaman Modal menjadi Kunci utama peningkatan Realisasi Investasi. Pengawasan dan Pembinaan terhadap Perusahaan perusahaan untuk tetap menyampaikan LKPM secara online terus dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan kesadaran dari pelaku usaha untuk memuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online.

Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan tugas dan fungsinya telah mencapai target bahkan melebihi target Renstra sebelumnya, pencapaian beberapa indikator dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indikator Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN diperoleh berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang dilaporkan oleh pelaku usaha/investor, dimana indikator tersebut dijalankan sesuai dengan program yang merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal yaitu program pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut merupakan hasil dari pengawasan dan pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan. Nilai Realisasi Investasi (PMA) Tahun 2023 yaitu Rp. 11.308.680.000.000,- (*Sebelas Triiliun Tiga Ratus Delapan Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)* dengan jumlah Perusahaan sebanyak 6850 perusahaan yang menanamkan modal di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023. Top tiga negara yang menjadi penanam modal asing di provinsi kepulauan riau adalah Singapura, Tiongkok, dan Hongkong.

   Dan untuk capaian target Nilai Realisasi Investasi (PMDN) Tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 8.856.600.000.000,- (*Delapan Triliun Delapan Ratus Lima Puluh Enam Miliar Enam Ratus Juta Rupiah*) dengan jumlah Perusahaan sebanyak 1753 perusahaan yang tersebar di 7 kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau.

2. Untuk indikator jumlah investor dalam negeri dan luar negeri diperoleh berdasarkan penghitungan jumlah izin yang terdaftar di OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) yang didukung melalui program promosi penanaman modal. Seiring berkembangnya teknologi dan peraturan yang ada, OSS yang pada dasarnya merupakan aplikasi yang digunakan untuk mempermudah segala proses perizinan ini telah mengalami

update pada sistem serta aturannya. Pada tahun 2018 Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) Online Single Submission, dan pada 2021 telah dilakukan perubahan terhadap PP 24 Tahun 2018 menjadi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan pemberian wewenang kepada daerah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Pada Tahun 2023, Perhitungan jumlah investor dalam negeri dan luarnegeri yang semula dihitung berdasarkan perusahaan yang terdata pada NSWI kini telah diubah metode perhitungannya melalui jumlah perusahaan yang terdata pada aplikasi OSS RBA yang telah direlease bersamaan dengan nilai realisasi investasi penanaman modal seluruh Indonesia oleh Kementerian Investasi/BKPM.

Adapun jumlah investor dalam dan luar negeri Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 ialah sebanyak 6850 Investor Luar Negeri (PMA) dan 1753 Investor Dalam Negeri (PMDN) yang tersebar di beberapa negara dan kabupaten/kota.

3. Terkait indikator nilai indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan satu pintu dan persentase pelayanan sesuai SOP didukung oleh Program pelayanan penanaman modal, yang merupakan tolak ukur keberhasilan bagi DPMPTSP Prov. Kepri dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan. Dalam hal ini, masih ada unsur dalam pelayanan yang harus ditingkatkan yaitu terkait sarana dan prasarana.

Berdasarkan pengukuran keseluruhan kuesioner yang telah diisi oleh responden terhadap kualitas ruang lingkup pelayanan, diperoleh hasil nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan angka Indeks sebesar 85,86 atau nilai kumulatif indeks 3.43 yang menunjukkan mutu pelayanan B (Kinerja Baik), karena berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 76,61 – 88,30.

Penjelasan terkait pencapaian kinerja perangkat daerah tergambar dalam tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau

No	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian			Proyeksi		Satuan
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan Berusaha			0	0	95	100	100	100	0	0	0	100	100	%
2	Persentase pemenuhan dokumen peta potensi investasi provinsi			n/a	100	100	100	100	100	n/a	100	100	100	100	%
3	Persentase kenaikan Minat Penanaman Modal			5	7	8	10	11	12	5	-37,3	8	10	11	%
4	Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP			70	80	90	100	100	100	82,5	80	98	100	100	%
5	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	%
6	Persentase ketersediaan data/informasi perkembangan investasi di Kepulauan Riau			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	%

2.3 Isu-isu Strategis

Dalam upaya peningkatan penanaman modal dan pelayanan perizinan secara terpadu di Tahun 2022, perlu adanya program dan kegiatan yang memperhatikan perubahan dan dinamika perubahan lingkungan strategis antara lain dengan pelaksanaan dan berlakunya komitmen pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan perdagangan global, Rencana Umum Penanaman Modal Nasional dan kebijakan ekonomi yang bertujuan meningkatkan daya saing secara nasional, pelayanan Perizinan dan peningkatan peluang penanaman modal. Demikian pula dalam pelayanan di daerah perlu memperhatikan dan kebutuhan dari kalangan dunia usaha/ dunia industri dan masyarakat pada umumnya.

1. Peluang (*Opportunities*) :

a. Kebijakan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN menjadi peluang meningkatkan penanaman modal di Provinsi Kepulauan Riau, terutama terkait dengan meningkatnya basis produksi, industri dan perdagangan yang terpadu.
b. Secara geografis letak Provinsi Kepulauan Riau sangat strategis berada di selat Malaka dan laut Cina Selatan, berbatasan langsung dengan pusat bisnis dan keuangan di Asia Pasifik, yakni Negara Singapura dan Malaysia. Sehingga mempermudah akses ke pusat-pusat bisnis, industri manufaktur dan jasa-jasa keuangan internasional di Kawasan Asia Tenggara.
c. Pengelolaan dan pengembangan kawasan-kawasan strategis dan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Batam, Karimun dan Bintan (Free Trade Zone) dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau.

d. Kekayaan potensi sumber daya alam dan potensi bahan tambang yang dapat menjadi andalan dan daya tarik bagi penanaman modal di Provinsi Kepulauan Riau.
e. Ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan setengah terampil dalam memberikan kontribusi terhadap kegiatan penanaman modal dan pengembangan industri pengolahan, perdagangan dan jasa-jasa penunjang perindustrian.
f. Adanya pemberian insentif fiskal, kebijakan peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan secara terpadu dalam kegiatan penanaman modal dan perizinan pada umumnya. Kebijakan tersebut semakin ditingkatkan melalui pelayanan berbasis teknologi informatika (TI).
g. Kebijakan peningkatan penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 – 2025 dan peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu berbasis teknologi informatika.
h. Kebijakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 44 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, termasuk di wilayah di Provinsi Kepulauan Riau meningkatkan daya saing daerah dan menjadi daya tarik investasi di daerah.

2. Tantangan (*Threats*) :

a. Adanya kesenjangan pembangunan dan perkembangan sarana dan prasarana dasar antar wilayah di Provinsi Kepulauan Riau sehingga menghambat investasi di daerah.
b. Belum optimalnya mekanisme kerja dan koordinasi antar satuan kerja perangkat daerah di lingkungan wilayah Provinsi Kepulauan Riau dalam meningkatkan promosi dan pelayanan penanaman modal di daerah.
c. Meningkatnya tuntutan pelayanan publik secara prima baik dari kalangan dunia usaha, perdagangan dan perusahaan jasa-jasa dan masyarakat pada umumnya dalam pelayanan perijinan dan non perijinan.
d. Kondisi Pandemi Covid-19 yang hingga saat ini masih menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi serta penghalang minat investor untuk berinvestasi di Kepulauan Riau.

Permasalahan yang timbul berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana dalam menunjang untuk melaksanakan tugas pokok dan peningkatan pelayanan masih terbatas, antara lain belum tersedianya gedung pusat pelayanan terpadu dan sumberdaya aparatur yang sesuai bidang teknologi informasi terbatas.
2. Jumlah aparatur di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu relatif terbatas dalam bidang pelayanan, belum adanya pejabat fungsional tertentu dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan.
3. Masih kurang lengkapnya data dan informasi tentang potensi dan peluang investasi di kabupaten/kota yang akan

dipromosikan kepada investor, terutama tentang proyek yang telah siap untuk dipromosikan (Ready to Sell) yang telah memiliki dokumen perencanaan yang jelas.

4. Pertumbuhan investasi penanaman modal asing (PMA) lebih banyak terkonsentrasi di 3 wilayah utama yaitu Kota Batam, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun, yang lebih siap dari infrastruktur fasilitas yang layak maupun akses ke wilayah, sementara kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau kurang lengkapnya data dan informasi potensi dan peluang investasi yang siap akan ditawarkan.
5. Koordinasi dan kerjasama antar kabupaten/kota belum optimal dalam rangka promosi bersama, promosi potensi dan peluang investasi masing – masing kabupaten/kota, melakukan promosi potensi dan peluang investasi. Hal ini disebabkan terbatasnya anggaran di tingkat kabupaten/kota untuk melakukan promosi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
6. Belum adanya Peraturan Daerah yang memberikan kemudahan dalam berinvestasi.
7. Belum semua Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM).

3. Rumusan Isu-Isu Strategis

Perumusan isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan dengan metode diskusi intensif dengan seluruh bidang-bidang dan sekretariat Dinas. Hasil rumusan isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

a. Belum optimalnya penanganan industri yang terdampak Covid-19. Penanganan industri yang terdampak Covid-19 dapat

dilaksanakan dengan pemberian insentif, pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah atau fasilitasi peminjaman modal.

b. Investasi yang belum merata antar wilayah maupun antar sektor, dipengaruhi infrastruktur dan sistem logistik yang belum mendukung, dan belum adanya insentif penanaman modal.
c. Belum optimalnya kerjasama ekonomi dengan pihak swasta agar dapat berinvestasi pada proyek jangka panjang seperti infrastruktur.
d. Promosi dan kerjasama investasi yang belum efektif dipengaruhi oleh ketersediaan data potensi dan peluang investasi yang menyajikan data penunjang investasi yang komprehensif.
e. Belum optimalnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP). Pelayanan perijinan perlu diarahkan menuju one day service dengan optimalisasi OSS RBA dan Wilayah Bebas dari Korupsi.
f. Kemanfaatan investasi yang belum maksimal. Saat ini kemanfaatan investasi adalah untuk penyerapan tenaga kerja dan belum bisa mensejahterakan masyarakat khususnya pelaku UKM.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pedoman penyusunan progam, kegiatan, dan sub Kegiatan urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal ialah terdapat pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dan telah tertuang dalam RKPD yang juga telah diselaraskan dengan dokumen Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026 serta telah melalui beberapa tahapan penyusunan termasuk entry pada aplikasi SIPD. Berikut Penjabaran dari Program, Kegiatan dan sub kegiatan yang akan di laksanakan DPMPTSP berdasarkan tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel.2.3.Review terhadap Rancangan Awal Tahun 2025 RKPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				**20.721.297.567**						
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Provinsi Kepulauan Riau**	**Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor**	**100**	**%**	**13.683.194.291**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Provinsi Kepulauan Riau**	**Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor**	**%**	
1.I	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Provinsi Kepulauan Riau***	***Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia***	***100***	***%***	***421.474.096***	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Provinsi Kepulauan Riau***	***Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia***	***%***	
1.I.i	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	Dokumen	286.474.096	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	
1.I.ii	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	Dokumen	65.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	

1.I.iV	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	Laporan	70.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan		
1.II	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Provinsi Kepulauan Riau***	***Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan***	***100***	***%***	***10.519.486.538***	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Provinsi Kepulauan Riau***	***Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan***		***%***		
1.II.i	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	Orang/Bulan	9.945.702.442	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang / Bulan		
1.II.ii	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	492.310.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen		
1.II.iii	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	81.474.096	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan		
1.III	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Provinsi Kepulauan Riau***	***Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah teradministrasi dengan baik***	***100***	***%***	***33.237.048***	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Provinsi Kepulauan Riau***	***Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah teradministrasi dengan baik***		***%***		
1.III.i	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12	Dokumen	33.237.048	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		
1.IV	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Provinsi Kepulauan Riau***	***Persentase Disiplin Pegawai***	***100***	***%***	***260.000.000***	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Provinsi Kepulauan Riau***	***Persentase Disiplin Pegawai***		***%***		
1.IV.ii	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	200.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		Paket		

1.IV.iv	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	Orang	60.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Orang		
1.V	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Provinsi Kepulauan Riau***	***Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***100***	***%***	***665.500.000***	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Provinsi Kepulauan Riau***	***Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah***		***%***		
1.V.i	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket	7.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket		
1.V.ii	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket		
1.V.iii	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket		
1.V.iv	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	50.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket		
1.V.v	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	15.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket		
1.V.vi	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	Dokumen	27.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Dokumen		
1.V.vi	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	Laporan	16.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Laporan		
1.V.vii	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	450.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan		

1.VI	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Provinsi Kepulauan Riau***	***Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu***	***100***	***%***	***380.000.000***	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Provinsi Kepulauan Riau***	***Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu***		***%***		
1.VI.i	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	300.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Unit		
1.VI.iv	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	80.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit		
1.VII	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Provinsi Kepulauan Riau***	***Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***100***	***%***	***1.258.759.561***	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Provinsi Kepulauan Riau***	***Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		***%***		
1.VII.ii	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	210.041.025	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan		
1.VII.iii	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	80.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Laporan		
1.VII.iv	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	968.718.536	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan		
1.VIII	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Provinsi Kepulauan Riau***	***Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara sesuai rencana kebutuhan***	***100***	***%***	***144.737.048***	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Provinsi Kepulauan Riau***	***Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara sesuai rencana kebutuhan***		***%***		

1.VIII.i	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10	Unit	105.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Unit		
1.VIII.ii	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	Unit	6.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit		
1.VIII.iii	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	33.237.048	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit		
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Provinsi Kepulauan Riau**	**Persentase pemenuhan dokumen peta potensi investasi provinsi**	**100**	**%**	**1.049.207.206**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Provinsi Kepulauan Riau**	**Persentase pemenuhan dokumen peta potensi investasi provinsi**		**%**		
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	***Provinsi Kepulauan Riau***	***Jumlah Dokumen Kajian dan Regulasi Terkait Penanaman Modal yang Tersusun***	***2***	***Perusahaan***	***674.207.206***	***Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi***	***Provinsi Kepulauan Riau***	***Jumlah perusahaan yang mendapatkan insentif dan kemudahan berusaha***		***Perusahaan***		
2.I.i	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	Dokumen	600.000.000	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Dokumen		
2.I.ii	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1	Dokumen	74.207.206	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha Di Daerah		Kegiatan Usaha		
2.II	***Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi***	**Provinsi Kepulauan Riau**	***Jumlah Dokumen Pemetaan Potensi Investasi***	***1***	***Dokumen***	***375.000.000***	***Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi***	**Provinsi Kepulauan Riau**	***Jumlah Dokumen Pemetaan Potensi Investasi***		***Dokumen***		

2.II.i	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	0	Dokumen	-	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi		Dokumen		
	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	1	Dokumen	75.000.000	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi		Dokumen		
2.II.ii	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	1	Dokumen	300.000.000	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi		Dokumen		
3	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	***Provinsi Kepulauan Riau***	**Persentase kenaikan Minat Penanaman Modal**	**10**	**%**	**2.226.396.719**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	***Provinsi Kepulauan Riau***	**Persentase kenaikan Minat Penanaman Modal**		**%**		
3.I	***Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi***	***Provinsi Kepulauan Riau***	***Jumlah Penambahan Investor Dalam Negeri dan Luar Negeri***	***7200***	***Investor***	***2.226.396.719***	***Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi***	***Provinsi Kepulauan Riau***	***Jumlah Penambahan Investor Dalam Negeri dan Luar Negeri***		***Investor***		
3.I.i	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	2	Dokumen	1.504.877.732	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi		Dokumen		
3.I.ii	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1	Dokumen	721.518.987	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi		Dokumen		
4	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Provinsi Kepulauan Riau**	**Persentase Pelayanan Perizinan yang terlayani**	**100**	**%**	**2.500.812.523**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Provinsi Kepulauan Riau**	**Persentase Pelayanan Perizinan yang terlayani**		**%**		
4.I	***Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota***	***Provinsi Kepulauan Riau***	***Jumlah Pelayanan Non Perizinan Yang Terlayani***	***0***	***Non Izin***	***1.000.000.000***	***Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota***	***Provinsi Kepulauan Riau***	***Jumlah Pelayanan Non Perizinan Yang Terlayani***		***Non Izin***		

4.I.i	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	200	Pelaku Usaha	550.000.000	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		Pelaku Usaha		
4.I.ii	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah	110	Kegiatan Usaha	450.000.000	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah		Kegiatan Usaha		
4.II	***Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi***	***Provinsi Kepulauan Riau***	***Jumlah Pelayanan Perizinan Yang Terlayani***	***100***	***%***	***1.500.812.523***	***Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi***	***Provinsi Kepulauan Riau***	***Persentase jumlah perizinan dan nonperizinan yang dilayani dengan SOP***		***%***		
4.II.i	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi	160	Dokumen	250.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi		Dokumen		
4.II.ii	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	120	Pelaku Usaha	300.000.000	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		Pelaku Usaha		
4.II.iii	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi	Provinsi Kepulauan Riau	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis	225	Pelaku Usaha	500.812.523	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha	Provinsi Kepulauan Riau	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha		Pelaku Usaha		

	secara Elektronik		Risiko Terintegrasi secara Elektronik				Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				
4.II.iv	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Provinsi Kepulauan Riau	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	160	Kegiatan Usaha	450.000.000	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Provinsi Kepulauan Riau	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha		Kegiatan Usaha		
5	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Provinsi Kepulauan Riau**	**Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM**	**100**	**%**	**1.056.199.055**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Provinsi Kepulauan Riau**	**Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM**		**%**		
5.I	***Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi***	***Provinsi Kepulauan Riau***	***Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM***	***100***	***%***	***1.056.199.055***	***Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi***	***Provinsi Kepulauan Riau***	***Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM***		***%***		
5.I.i	Pengawasan Penanaman Modal	Provinsi Kepulauan Riau, Anambas	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan, serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	40	Kegiatan Usaha	290.000.000	Pengawasan Penanaman Modal	Provinsi Kepulauan Riau, Anambas	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan, serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha		Kegiatan Usaha		
5.I.ii	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	16	Kegiatan Usaha	206.199.055	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		Kegiatan Usaha		

5.I.iii	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Provinsi Kepulauan Riau, Batam	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	380	Pelaku Usaha	560.000.000	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Provinsi Kepulauan Riau, Batam	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		Pelaku Usaha		
6	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Provinsi Kepulauan Riau**	**Persentase Ketersediaan Data/Informasi Perkembangan Investasi Di Kepulauan Riau**	**100**	**%**	**205.487.773**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Provinsi Kepulauan Riau**	**Persentase Ketersediaan Data/Informasi Perkembangan Investasi Di Kepulauan Riau**		**%**		
6.I	***Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi***	***Provinsi Kepulauan Riau***	***Data/Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dan Aplikasi Sistem Informasi Terkelola Dengan Baik***	***12***	***Bulan***	***205.487.773***	***Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi***	***Provinsi Kepulauan Riau***	***Data/Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dan Aplikasi Sistem Informasi Terkelola Dengan Baik***		***Bulan***		
6.I.i	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4	Dokumen	205.487.773	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan		Dokumen		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Sebagai salah satu Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Penanaman Modal dan PTSP berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan. Dalam kesempatan Musrenbang di tahun 2024, apabila ada aspirasi masyarakat maka akan menjadi perhatian serius Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025. Suatu langkah penting yang harus diambil adalah kembali menata dan menyusun berbagai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP dapat dijalankan dengan tertib, terarah, efektif dan efisien.

Tabel.2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD			CATATAN PENTING
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau, Bintan	Program Promosi Investasi Bersama di luar Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota)	1 Dokumen	
2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau, Bintan	Forum Bisnis Investasi Tingkat Provinsi Kepri dengan Dubes Malaysia, Singapura, Brunei (Coffee Morning Bersama Pengusaha dan Pemimpin Daerah Kab/Kota)	1 Dokumen	
3	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau, Anambas	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	
4	Pengawasan Penanaman Modal	Provinsi Kepulauan Riau, Anambas	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	30 Kegiatan Usaha	
5	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Provinsi Kepulauan Riau, Batam	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	
6	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Provinsi Kepulauan Riau, Karimun	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Service Excellent dan Handling Complaint)	10 Orang	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan yang akan dicapai Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun 2020-2024 adalah:

1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta
2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

Kementerian Investasi/BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu "Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian" sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024. Dengan mempertimbangkan Sasaran pembangunan Tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan Kementerian Investasi/BKPM tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal;
2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan
3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

Kementerian Investasi/BKPM akan mendukung pencapaian sasaran pembangunan "Meningkatnya Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, dan Daya Saing Perekonomian" yang akan dicapai melalui arah kebijakan "Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi" dan strategi "Memperbaiki Iklim Usaha dan Meningkatkan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan". Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi akan dilaksanakan melalui:

1. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan serta kebijakan antar sektor dan wilayah;
2. Fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan, penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan, perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
3. Reformasi ketenagakerjaan melalui upaya penciptaan iklim ketenagakerjaan yang kondusif yang didukung oleh hubungan industrial yang harmonis, penguatan collective bargaining, penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan, peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan peran pemerintah daerah, serta peningkatan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perlindungan tenaga kerja akan diwujudkan melalui penerapan sistem perlindungan social universal bagi pekerja, pembenahan sistem pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran, dan penerapan sistem pengawasan ketenagakerjaan secara efektif;
4. Penguatan kebijakan dan kelembagaan persaingan usaha; dan
5. Peningkatan kapasitas, kapabilitas serta daya saing BUMN, antara lain melalui pembentukan holding BUMN dan membuka pasar pada jaringan internasional.

Berikut ini adalah hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kepulauan Riau dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Renstra Kementerian Investasi/BKPM tahun 2020- 2024.

Tabel 3.1

Permasalahan Pelayanan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Terhadap Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2020-2024

Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Tujuan: 1) Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima. Sasaran strategis: 1) Meningkatnya realisasi penanaman modal; 2) Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan 3) Terwujudnya birokrasi yang 2) bersih, efektif,dan melayani.	(1) Belum optimalnya penanganan industri yang terdampak Covid-19, mencakup pemberian insentif, pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah atau fasilitasi peminjaman modal. (2) Belum optimalnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP). Hal ini ditunjukkan nilai IKM yang menurun dari 82,34 pada tahun 2019 menjadi 81,93 pada tahun 2020. Kemudahan layanan perizinan dengan one day service sangat diperlukan agar jumlah dan nilai investasi dapat semakin meningkat dan selaras dengan iklim investasi nasional serta menghindari semakin panjangnya alur birokrasi perizinan. Selain itu, belum optimalnya penerapan Online Single Submission Risk Based Appproach (OSS RBA). (3) Belum optimalnya kerjasama ekonomi dengan pihak swasta agar dapat berinvestasi pada proyek jangkapanjang seperti infrastruktur. (4) Sebaran investasi yang belum proporsional, secara antar wilayah maupun antar sektor yang saat ini didominasi oleh Batam dan adanya hambatan investasi karena wilayah Kepulauan Riau didominasi oleh laut. Adanya kajian tentang peta potensi antar wilayah dan antar sektor sangat diperlukan (5) Kemanfaatan investasi yang belum maksimal. Hal ini disebabkan saat ini kemanfaatan investasi adalah untuk penyerapan tenaga kerja dan belum bisa mensejahterakan masyarakat khususnya pelaku UKM. Selain itu, sebagian besar investasi merupakan sektor industri berskala besar untuk kebutuhan industri nasional yang belum ada keterkaitan dengan sumberdaya lokal.	1. Belum adanya regulasi daerah (Perda dan Pergub) yang mengatur tentang pemberian insentif penanaman modal maupun pemberian insentif bagi industri yang terdampak Covid-19. 2. Keterbatasan kualitas Sumber daya manusia dalam pelayanan perizinan dan non perizinan dan peningkatan penanaman modal 3. Kurangnya anggaran untuk penyediaan data potensi dan peluang investasi di masing-masing kabupaten yang komprehensif 4. Kurangnya koordinasi dalam upaya mempersingkat waktu penyelesaian layanan perizinan dan non perizinan sesuai Standard Operating Procedure (SOP) dan peningkatan layanan online. 5. Dukungan infrastruktur dan logistik yang kurang memadai dalam rangka menunjang peningkatan investasi Perlambatan dan stagnasi pertumbuhan ekonomi dunia akibat pandemi covid-19.	1. Peningkatan kemudahan regulasi dalam rangka peningkatan investasi daerah seiring dengan implementasi UU cipta kerja. 2. Penerapan online single subsmission (OSS) dalam pelayanan perizinan dan non perizinan. 3. Peningkatan jumlah layanan perizinan dan non perizinan yang dilayani PTSP.

	Kurangnya data potensi dan informasi potensi dan peluang investasi yang komprehensif menyajikan data terkait investasi seperti tanah, tenaga kerja, upah, dan perhitungan keuntungan investasi untuk digunakan sebagai media promosi dan kerjasama investasi daerah.		

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Adapun tujuan Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam menyusun Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektivitas promosi dan penyiapan bahan promosi (Investment Project Ready To Offer / proyek investasi Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal dengan mempermudah pelayanan penanaman modal yang siap ditawarkan)
2. Mewujudkan pengelolaan dan ketersediaan data penamanan modal berbasis teknologi informasi
3. Meningkatkan manajemen berbasis risiko dan akuntabilitas kinerja melalui perencanaan berbasis kinerja, pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel, dan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penerapan proses bisnis dan SOP, dan peningkatan aparatur sipil negara yang profesional dan berintegritas.
4. Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui optimalisasi bimbingan pelaksanaan penanaman modal dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi perusahaan (debottlenecking).
5. Meningkatkan minat investor untuk berinvestasi melalui penerapan kebijakan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal.

6. Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan publik menuju one day service melalui peningkatan kapasitas aparatur pelayanan dan calon penanam modal dalam pemanfaatan OSS, serta penerapan Online Single Submission Risk Based Appproach (OSS RBA).

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
				Tahun 2024
Terwujudnya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Investasi		Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	%	3,68
	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN	Milyar rupiah	19.609
	Meningkatnya Kualitas layanan PTSP	Nilai hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan PTSP	nilai	84,88
Terwujudnya Tata Kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Persentase ketercapaian indikator kinerja utama (IKU)	%	100
	Meningkatnya kualitas tata Kelola Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Nilai SAKIP DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau	%	BB

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program merupakan kumpulan kegiatan dan sub kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan DPMPTSP untuk Rencana Kerja DPMPTSP tahun 2025 mengacu kepada program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada dalam Perubahan Renstra DPMPTSP tahun 2021-2026 serta telah disesuaikan berdasarkan aturan terbaru. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 disusun sebagai upaya untuk mendukung pemerintah daerah dalam mencapai Visi dan Misi daerah, sebagaimana yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan , disamping melaksanakan program dan Rutin Perangkat Daerah, pada tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau dalam rencana kerja Tahun 2024 merencanakan akan melaksanakan 2 (dua) Urusan Wajib yaitu : Urusan Penunjang Pemerintah Daerah dan Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal. Dari kedua urusan tersebut di breakdown ke dalam 6 Program dan 16 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan.

Ringkasan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPMPTSP pada tahun 2025 dapat dilihat pada **tabel 4.1**. berikut.

Tabel 4.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				RENCANA TAHUN 2024											CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025			KETERANGAN
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)	Lokasi Ouput Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)					Tolok Ukur	Target		
							Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL														21.590.085.363					22.769.107.425	
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor**				**Provinsi Kepulauan Riau dan Luar Kepulauan Riau**	**100**	**%**							**14.718.392.486**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor**	**100%**	**15.782.523.136**	
2.18.01.1.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***		***Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia***			***Kepulauan Riau***			***100***	***%***					***237.650.000***	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		***Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia***	***100%***	***320.000.000***	
2.18.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kepulauan Riau					1	Dokumen	1	Dokumen	57.650.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	75.000.000	

2.18.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA SKPD yang tersusun	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kepulauan Riau					1	Dokumen	1	Dokumen	70.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	85.000.000	
2.18.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kepulauan Riau					1	Dokumen	1	Laporan	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	85.000.000	
2.18.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kepulauan Riau					1	Dokumen	1	Laporan	60.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	75.000.000	
2.18.01.1.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***		***Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan***			***Kepulauan Riau***			***100***	***%***					***11.270.967.032***	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		***Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan***	***100%***	***11.735.456.301***	
2.18.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kepulauan Riau					14	Bulan	46	Orang / Bulan	10.748.472.032	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/ Bulan	11.212.961.301	
2.18.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang tersusun	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kepulauan Riau					12	Bulan	1	Dokumen	492.495.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	492.495.000	
2.18.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Buku Laporan Keuangan DPMPTSP Prov. Kepri	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kepulauan Riau					10	Dokumen	1	Laporan	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15.000.000	

2.18.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			Jumlah Buku Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kepulauan Riau					12	Dokumen	1	Laporan	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	15.000.000	
2.18.01.1.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***		***Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah teradministrasi dengan baik***			***Kepulauan Riau***			***100***	***%***					***44.220.000***	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		***Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah teradministrasi dengan baik***	***100%***	**44.220.000**	
2.18.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kepulauan Riau					12	Bulan	1	Dokumen	29.220.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	29.220.000	
2.18.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kepulauan Riau					12	Dokumen	1	Laporan	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	15.000.000	
2.18.01.1.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***		***Persentase Disiplin Pegawai***			***Kepulauan Riau***			***100***	***%***					***400.000.000***	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		***Persentase Disiplin Pegawai***	***100%***	***400.000.000***	
2.18.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kepulauan Riau					12	Bulan	1	Unit	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	100.000.000	
2.18.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Pakaian Dinas Yang Diadakan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kepulauan Riau					37	Unit	1	Paket	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	150.000.000	
2.18.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			Jumlah Peserta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kepulauan Riau					7	Peserta	1	Dokumen	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	50.000.000	

2.18.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Peserta Pelatihan Bagi Aparatur DPMPTSP Prov. Kepri	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kepulauan Riau					7	Orang	7	Orang	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	50.000.000	
2.18.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Peserta Bimtek	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kepulauan Riau					7	Peserta	7	Orang	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	50.000.000	
2.18.01.1.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***		***Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah***			***Kepulauan Riau***			***100***	***%***					***511.426.572***	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		***Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***100%***	***611.426.572***	
2.18.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kepulauan Riau					12	Bulan	1	Paket	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	
2.18.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah pemenuhan kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kepulauan Riau					12	Bulan	1	Paket	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	
2.18.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah pemenuhan kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kepulauan Riau					12	Bulan	1	Paket	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	
2.18.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah pemenuhan kebutuhan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kepulauan Riau					12	Bulan	1	Paket	80.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	80.000.000	
2.18.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kepulauan Riau					12	Bulan	1	Paket	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	

2.18.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan			Jumlah pemenuhan kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kepulauan Riau					12	Bulan	1	Dokumen	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	20.000.000	
2.18.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah pemenuhan kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kepulauan Riau					12	Bulan	1	Laporan	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	30.000.000	
2.18.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Luar Daerah dan Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kepulauan Riau					12	Bulan	1	Laporan	251.426.572	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	351.426.572	
2.18.01.1.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		***Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu***			***Kepulauan Riau***			***100***	***%***					***700.523.641***	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		***Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu***	***100%***	***1.029.600.213***	
2.18.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kepulauan Riau					1	Unit	1	Unit	300.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	479.076.572	
2.18.01.1.07.05	Pengadaan Mebel			Jumlah Mebel yang Diadakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kepulauan Riau					2	Unit	1	Paket	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	50.000.000	
2.18.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Diadakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kepulauan Riau					12	Bulan	1	Unit	350.523.641	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	500.523.641	

2.18.01.1.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		***Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***			***Kepulauan Riau***			***100***	***%***					***1.368.850.241***	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		***Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***100%***	***1.407.065.050***	
2.18.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kepulauan Riau					12	Bulan	1	Laporan	132.948.192	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	132.948.192	
2.18.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kepulauan Riau					12	Bulan	1	Laporan	120.554.809	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	120.554.809	
2.18.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kepulauan Riau					12	Bulan	1	Laporan	82.340.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	120.554.809	
2.18.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Gaji PTT dan THL)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kepulauan Riau					13& 12	Bulan	1	Laporan	1.033.007.240	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.033.007.240	
2.18.01.1.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		***Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara sesuai rencana kebutuhan***			***Kepulauan Riau***			***100***	***%***					***184.755.000***	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		***Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara sesuai rencana kebutuhan***	***100%***	***234.755.000***	
2.18.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabata	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kepulauan Riau					12	Bulan	13	Unit	126.679.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit	126.679.000	

2.18.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Terpelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kepulauan Riau					12	Bulan	7	Unit	8.076.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	8.076.000	
2.18.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah pemenuhan Kebutuhan pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kepulauan Riau					12	Bulan	1	Unit	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan Berusaha**				**Provinsi Kepulauan Riau**	**100**	**%**							**652.058.448**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan Berusaha**	**100%**	**719.207.206**	
		Persentase pemenuhan dokumen peta potensi investasi provinsi					**100**	**%**										**Persentase pemenuhan dokumen peta potensi investasi provinsi**	**100%**		
2.18.02.1.01	***Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi***		***Jumlah Regulasi pemberian Insentif dan kemudahaan berusaha***			***Kepulauan Riau***			***1***	***Dokumen***					***452.058.448***	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		***Jumlah Regulasi pemberian Insentif dan kemudahaan berusaha***	***1 Dokumen***	***419.207.206***	
			Jumlah perusahaan yang mendapatkan insentif dan kemudahan berusaha						***200***	***Perusahaan***								***Jumlah perusahaan yang mendapatkan insentif dan kemudahan berusaha***	***250 Perusahaan***		
2.18.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			Jumlah Dokumen Kajian dan Regulasi Pemberian Insentif dan Kemudahaan Berusaha	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kepulauan Riau					1	Dokumen	1	Dokumen	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	200.000.000	
				Jumlah Peserta Konsultasi Publik							100	Orang									
				Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan							-	Orang									

2.18.02.1.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha Di Daerah	Kepulauan Riau					1	Dokumen	200	Kegiatan Usaha	252.058.448	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha Di Daerah	200 Kegiatan Usaha	219.207.206	
				Jumlah Pelaksanaan Pemberian Insentif							1	Kegiatan								
2.18.02.1.02	***Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi***		***Jumlah Dokumen Pemetaan Potensi Investasi***			**Kepulauan Riau**			***2***	***Dokumen***					***200.000.000***	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		***Jumlah Dokumen Pemetaan Potensi Investasi***	***2 Dokumen***	***300.000.000***	
2.18.02.1.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi			Jumlah Dokumen Penyempurnaan RUPM Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Kepulauan Riau					-	Dokumen	1	Dokumen	80.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Dokumen	100.000.000	
				Jumlah peserta sosialisasi RUPM							30	Orang								
2.18.02.1.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi			Jumlah Dokumen Pemetaan Potensi Investasi Daerah	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	Kepulauan Riau					1	Dokumen	1	Dokumen	120.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	1 Dokumen	200.000.000	
				Jumlah Dokumen Profil Pengembangan Penanaman Modal							-	Dokumen								
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase kenaikan Minat Penanaman Modal**				***Provinsi Kepulauan Riau***	**10**	**%**							**2.006.333.687**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**Persentase kenaikan Minat Penanaman Modal**	**11%**	**2.054.877.732**	
2.18.03.1.01	***Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi***		***Jumlah Penambahan Investor Dalam Negeri dan Luar Negeri***			***Kepulauan Riau***			***7200***	***Investor***					***2.006.333.687***	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		***Jumlah Penambahan Investor Dalam Negeri dan Luar Negeri***	***8000 Investor***	***2.054.877.732***	

2.18.03.1.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi			Jumlah Jenis Bahan Promosi	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Provinsi	Kepulauan Riau					1	Bahan Promosi	1	Dokumen	800.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Provinsi	1 Dokumen	800.000.000	
				Jumlah Media Publikasi							1	Media									
				Jumlah Peserta Pelatihan							30	Peserta									
2.18.03.1.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi			Jumlah Bussiness Meeting Yang Diikuti/diselenggarakan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	Kepulauan Riau					2	Event	1	Dokumen	1.206.333.687	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	2 Dokumen	1.254.877.732	
				Jumlah Event Promosi Investasi							2	Kegiatan									
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**				**Provinsi Kepulauan Riau**	**84,88**	**Indeks**							**3.076.378.320**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**	**85,2 Indeks**	**3.150.812.523**	
		Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP					**100**	**%**										**Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP**	**100%**		
2.18.04.1.01	***Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota***		***Persentase jumlah perizinan dan nonperizinan yang dilayani dengan SOP***			***Kepulauan Riau***			***100***	***%***					***776.378.320***	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		***Persentase jumlah perizinan dan nonperizinan yang dilayani dengan SOP***	***100%***	***800.812.523***	
2.18.04.1.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kepulauan Riau					1	Kegiatan	200	Pelaku Usaha	400.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lintas Daerah Kabupaten/Kota	220 Pelaku Usaha	450.000.000	

2.18.04.1.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal			Jumlah Laporan Verifikasi Permohonan Non Perizinan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Pelaku Usaha	Kepulauan Riau					1000	Laporan	120	Kegiatan Usaha	376.378.320	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Pelaku Usaha	110 Kegiatan Usaha	350.812.523	
2.18.04.1.02	***Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi***		***Persentase jumlah perizinan dan nonperizinan yang dilayani dengan SOP***			***Kepulauan Riau***			***100***	***%***					***2.300.000.000***	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		***Persentase jumlah perizinan dan nonperizinan yang dilayani dengan SOP***	***100%***	***2.350.000.000***	
2.18.04.1.02.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	Kepulauan Riau					1	Kegiatan	600	Pelaku Usaha	1.100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	600 Pelaku Usaha	1.100.000.000	
2.18.04.1.02.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal			Jumlah Laporan Verifikasi Permohonan Perizinan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	Kepulauan Riau					600	Dokumen	250	Kegiatan Usaha	500.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	250 Kegiatan Usaha	500.000.000	
2.18.04.1.02.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan			Jumlah Laporan Pengelolaan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan	Kepulauan Riau					1	Kegiatan	50	Orang	500.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan	50 Orang	500.000.000	

	Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan			Jumlah Laporan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap PTSP Provinsi Kepulauan Riau	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi						4	Buku				(PAD)		Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi			
				Jumlah Penyelenggaraan Layanan Konsultasi dan Informasi Layanan							1	Dokumen								
2.18.04.1.02.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah			Jumlah Dokumen Harmonisasi Regulasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Provinsi	Kepulauan Riau					1	Dokumen	45	Kegiatan Usaha	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Provinsi	50 Kegiatan Usaha	250.000.000	
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM**				**Provinsi Kepulauan Riau**	**100**	**%**							**835.972.369**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM**	**100%**	**856.199.055**	
2.18.05.1.01	***Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi***		***Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM***			***Provinsi Kepulauan Riau***			***100***	***%***					***835.972.369***	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		***Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM***	***100%***	***856.199.055***	
2.18.05.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal			Jumlah Perusahaan yang dilakukan Pemantauan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kepulauan Riau					40	Perusahaan	15	Kegiatan Usaha	195.972.369	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	18 Kegiatan Usaha	216.199.055	
				Taskforce & Asistensi Pengendalian Penanaman Modal							30	Perusahaan								

2.18.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal			Jumlah Perusahaan Yang Dilakukan Pembinaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kepulauan Riau					30	Perusahaan	365	Pelaku Usaha	425.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	380 Pelaku Usaha	440.000.000	
				Jumlah Perusahaan Yang Dilakukan Bimbingan Penanaman Modal							30	Perusahaan								
				Frekuensi Rapat Koordinasi Penanaman Modal							1	kali								
				Jumlah dokumen informasi kemitraan antara Perusahaan dengan UMKM							1	dokumen								
2.18.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal			Jumlah Perusahaan Yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kepulauan Riau					220	Perusahaan	35	Kegiatan Usaha	215.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	30 Kegiatan Usaha	200.000.000	
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Ketersediaan Data/Informasi Perkembangan Investasi Di Kepulauan Riau**				**Provinsi Kepulauan Riau**	**100**	**%**							**300.950.053**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**Persentase Ketersediaan Data/Informasi Perkembangan Investasi Di Kepulauan Riau**	**100%**	**205.487.773**	
2.18.06.1.01	***Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi***		***Data/Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dan Aplikasi Sistem Informasi Terkelola Dengan Baik***			***Kepulauan Riau***			***12***	***Bulan***					***300.950.053***	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		***Data/Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dan Aplikasi Sistem Informasi Terkelola Dengan Baik***	***12 Bulan***	***205.487.773***	

2.18.06.1.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			Jumlah Dokumen Data/Informasi Terkait Penanaman Modal Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kepulauan Riau					1	Dokumen	1	Dokumen	300.950.053	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	205.487.773	
				Jumlah Konten/Informasi Terkait Penanaman Modal Yang Dipublikasikan Melalui Website							30	Orang								
				Jumlah Pembuatan/ Update Aplikasi Data Perizinan Non Perizinan se-Provinsi Kepulauan Riau							-	Aplikasi								
				Jumlah Peserta Bimtek Pengelolaan Data dan Informasi Yang Dilaksanakan							100	Konten								

BAB V
PENUTUP

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2024 telah disusun dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) ini berdasarkan acuan dokumen-dokumen perencanaan di tingkat vertikal sekaligus mempertimbangkan berbagai hasil analisis terhadap perkembangan terbaru kondisi masyarakat maupun kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah.

Pada Renja tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau telah merencanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan sebanyak 6 program, 15 kegiatan dan 49 Sub Kegiatan sesuai dokumen RENSTRA DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 yang nomenklaturnya berdasar pada KEPMENDAGRI 050-3778 Tahun 2021. Perencanaan memang bukan segala-galanya, tetapi tanpa proses perencanaan yang baik maka pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak akan berjalan baik. Dengan disusunnya dokumen Renja Organisasi Perangkat Daerah ini diharapkan perencanaan program dan kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau dapat lebih matang, sehingga mempermudah proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta mampu memberi kontribusi terhadap capaian target pembangunan Provinsi Kepulauan Riau.

Renja Tahun 2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau untuk Tahun Anggaran 2024. Kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan serta komitmen dari pimpinan dan staf Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Renja ini. Keberhasilan pelaksanaan Renja juga

akan sangat menentukan pencapaian target-target kinerja dalam Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026.

Dokumen Renja Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau ini harus menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau. Selain digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024, Renja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau dan hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk mewujudkan good government di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, **November 2025**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

HASPARIZAL HANDRA, S.Sos
Pembina Utama Muda / IV c
NIP.19690329 199003 1 009